



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 281 / III / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH PROVINSI RIAU PERIODE 2021 - 2024

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Teknologi Informasi & Komunikasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini dan merupakan sarana penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan publik yang optimal;
- b. bahwa untuk pencapaian pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima berbasis teknologi dan informasi sesuai misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau Periode 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintah Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Electronik Government (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Riau Periode 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan/pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi daerah.

- b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah, badan usaha milik negara/daerah, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi.
- d. melakukan monitoring dan evaluasi/audit teknologi, infrastruktur, standarisasi dan rekomendasi pengembangan serta pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas wilayah/lintas sektor/perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien.
- e. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Kelompok Kerja yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberi bantuan dukungan teknis operasional dan administrasi;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan data informasi; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Provinsi Riau untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 MARET 2021

GUBERNUR RIAU,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 281/III/2021
TANGGAL : 5 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH PROVINSI RIAU
PERIODE 2021-2024**

1. TIM PENGARAH :

- a. Ketua : Gubernur Riau
- Wakil Ketua : Wakil Gubernur Riau
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- Wakil ketua Harian : Prof. Zainal A. Hasibuan Ph.D
- c. Anggota :
 - 1) Inspektur Daerah Provinsi Riau
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
 - 3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
 - 4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 - 5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
 - 6) Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
 - 7) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 - 8) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau
 - 9) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau
 - 10) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau

2. TIM PENASEHAT :

- a. Koordinator : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- b. Anggota
 - 1) Rektor Universitas Riau
 - : 2) Rektor Universitas Islam Riau
 - 3) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - 4) Rektor Universitas Lancang Kuning
 - 5) Rektor Universitas Abdurrah
 - 6) Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
 - 7) Direktur Politeknik Caltex Riau

- 8) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 9) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 10) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 11) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 12) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 13) Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru
- 14) Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Riau

3. TIM PELAKSANA :

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - Wakil ketua : Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc (Akademisi Politeknik Caltex Riau)
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Aplikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- c. Anggota
 - 1) Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 2) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 3) Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 4) Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 5) Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Riau
 - 6) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
 - 7) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau
 - 8) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 - 9) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

- 10) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
- 11) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 12) Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- 13) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau
- 14) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
- 15) Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 16) Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 17) Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 18) Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- 19) Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau
- 20) Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau
- 21) Ketua APTIKOM Provinsi Riau
- 22) Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) Riau
- 23) Ketua Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (AISINDO) Riau
- 24) Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Riset dan Penerapan Teknologi KADIN Riau.
- 25) Dr. Elfizar, S.Si, M.Kom (Akademisi Universitas Riau)
- 26) Dr. Alwis Nazir, M.Kom (Akademisi UIN Suska Riau)
- 27) Prof. Dr. Syaiful Bahri, M.Si. (Akademisi)
- 28) Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M.Sc (Akademisi UIN Suska Riau)
- 29) Dr. Evizal, ST, M.Eng – (Akademisi UIR)
- 30) Muhammad Ihsan Zul, S.Pd., M.Eng. (Akademisi Politeknik Caltex Riau)
- 31) Drs. M. Suhada, M.M. (Wakil Masyarakat)
- 32) Yasna Dewita, S.Kom
- 33) Dedi Ariandi (Wakil Komunitas Heritage)

- 34) Mike Agnesia (Wakil Komunitas)
- 35) Melaty Riza, S.E. (Wakil Komunitas Ekonomi Kreatif)
- 36) Farly Nur Dewantara (Komunitas IT/Assist.id)

4. SEKRETARIAT :

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- b. Anggota
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 4) Kepala Seksi Komunikasi Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 5) Kepala Seksi Diseminasi Informasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 6) Kepala Seksi Multimedia dan Dokumentasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 7) Kepala Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 8) Kepala Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 9) Kepala Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 10) Kepala Seksi Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi dan Informatika Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 11) Kepala Seksi Integrasi dan Interoperabilitas Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
 - 12) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

- 13) Kepala Seksi Statistik Sosial Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- 14) Kepala Seksi Statistik Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- 15) Kepala Seksi Statistik Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- 16) Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- 17) Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau
- 18) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau

5. TIM MITRA

- :
- 1) PT. Telekomunikasi Indonesia Pekanbaru
 - 2) PT. Telkomsel Pekanbaru
 - 3) PT. Indosat Pekanbaru
 - 4) PT. XL Axiata Pekanbaru
 - 5) PT. Garuda Indonesia Pekanbaru
 - 6) PT. Pertamina Pekanbaru
 - 7) PT. RAPP
 - 8) PTPN V
 - 9) Asosiasi Penyedia Jasa Internet





WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 557 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOLABORASI KELITBANGAN
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan kualitas kelitbangan guna mewujudkan *Research Based Policy* dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru melalui Program Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandangan perlu untuk membentuk Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru dengan perguruan tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 168 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. penasihat

memberikan arahan pada aspek makro kebijakan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru.

b. pembina

memberikan kebijakan pada aspek strategis terhadap agenda pelaksanaan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru.

c. ketua

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru.

d. Anggota, terdiri dari :

1. Perwakilan BPP

a) mensinergikan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui LPPM perguruan tinggi;

b) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru;

- c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, pengabdian masyarakat, pengembangan inovasi dan teknologi dengan perangkat daerah dan perguruan tinggi;
- d) menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian serta hasil pengembangan inovasi dan teknologi melalui kegiatan seminar, workshop atau kegiatan lainnya yang sejenis; dan
- e) menyusun laporan kegiatan Forum Kolaborasi Kelitbangan Kota Pekanbaru.

2. Perwakilan Perangkat Daerah (PD)

- a) melakukan pemetaan isu atau permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah;
- b) memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, pengabdian masyarakat, pengembangan inovasi dan teknologi melalui BPP Kota Pekanbaru;
- c) menginventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan menyampaikan data tersebut melalui BPP Kota Pekanbaru; dan
- d) menyampaikan usulan pelaksanaan kegiatan penelitian atau kajian maupun usulan pengembangan inovasi dan teknologi melalui BPP Kota Pekanbaru.

3. Perwakilan LPPM Perguruan Tinggi

- a) mensinergikan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPP Kota Pekanbaru;
- b) mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penelitian atau kajian terhadap isu-isu pembangunan daerah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh LPPM perguruan tinggi;
- c) mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi yang dilaksanakan oleh LPPM perguruan tinggi

bersama perangkat daerah melalui BPP Kota Pekanbaru ;

- d) mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kota Pekanbaru; dan
- e) menginventarisasi dan menyampaikan kegiatan penelitian atau kajian serta kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM perguruan tinggi melalui BPP Kota Pekanbaru.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Walikotaini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 25 Juni 2021

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 557 Tahun 2021

TANGGAL : 25 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI KELITBANGAN
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Walikota Pekanbaru	Penasihat	
2	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Pembina	
3	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru	Ketua	
4	Sekretaris Badan	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
5	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
7	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
8	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
9	Perekayasa Ahli Madya	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
10	Peneliti Ahli Pertama	Anggota	Perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan
11	Kepala Dinas	Anggota	Perwakilan Disdukcapil
12	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota	Perwakilan Disdukcapil
13	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Anggota	Perwakilan Disdukcapil
14	Kepala Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM
15	Kepala Bidang Kelembagaan	Anggota	Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM
16	Pengawas Koperasi Ahli Madya	Anggota	Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM

1	2	3	4
93	Kepala Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
94	Sekretaris Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
95	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
96	Kepala Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Perhubungan
97	Sekretaris Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Perhubungan
98	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Perwakilan Dinas Perhubungan
99	Kepala Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
100	Sekretaris Dinas	Anggota	Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
101	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
102	Ketua BP2M	Anggota	Perwakilan LPPM Politeknik Caltex Riau
103	Dosen PCR	Anggota	Perwakilan LPPM Politeknik Caltex Riau
104	Ketua LPPM	Anggota	Perwakilan LPPM UIR
105	Sekretaris LPPM	Anggota	Perwakilan LPPM UIR
106	Dekan Fakultas Teknik	Anggota	Perwakilan LPPM UIR
107	Ketua LPPM	Anggota	Perwakilan LPPM UNILAK
108	Sekretaris LPPM	Anggota	Perwakilan LPPM UNILAK
109	Sekretaris LPPM	Anggota	Perwakilan LPPM UNRI
110	Koordinator Pusat Studi Bencana	Anggota	Perwakilan LPPM UNRI
111	Dosen Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik	Anggota	Perwakilan LPPM UMRI
112	Dosen Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota	Perwakilan LPPM UMRI

1	2	3	4
113	Ketua LPPM	Anggota	Perwakilan LPPM UNIVRAB
114	Kepala Bidang Penelitian	Anggota	Perwakilan LPPM UNIVRAB

WALIKOTA PEKANBARU,



RIRDAUS

**KEPUTUSAN KETUA UMUM APTİKOM PUSAT
NOMOR : KEP. 006/DE-SK/APTIKOM/II/2019**

TENTANG

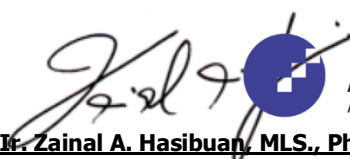
**PENETAPAN KEPENGURUSAN APTİKOM PROVINSI RIAU
PERIODE TAHUN 2019-2023**

- Menimbang :
- bahwa struktur organisasi APTİKOM harus dapat memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan.
 - bahwa organisasi APTİKOM harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi dari APTİKOM.
 - bahwa untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta harmonisasi sesuai dengan kebutuhan, perubahan, relevansi dan spesifikasi khususnya di Bidang Informatika dan Komputer, maka perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan kualitas di bidang perguruan tinggi Bidang Informatika dan Komputer.
 - bahwa dalam rangka mempercepat terbentuknya kepengurusan lengkap APTİKOM, perlu adanya pengurus APTİKOM Provinsi di seluruh Indonesia.
 - bahwa pembentukan pengurus APTİKOM Provinsi adalah melalui sebuah proses demokrasi, berupa pemilihan dalam acara Musyawarah Provinsi (MusProv) atau Musyawarah Daerah (MusDa).
 - sehubungan dengan butir a, b, c, d dan e, maka perlu ditetapkan Pengurus APTİKOM Provinsi Riau Periode Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum APTİKOM Pusat.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Surat Keputusan Ketua Umum APTİKOM Nomor Kep. 111/DE-SK/APTIKOM/X/2018 tentang Penetapan Pimpinan Sidang MUNAS V APTİKOM tertanggal 19 Oktober 2018.
 - Ketetapan Pimpinan Sidang MUNAS V APTİKOM Nomor : 01/PS-MUNAS V/APTIKOM/191018/P tertanggal 19 Oktober 2018 tentang Ketetapan Ketua Umum dan Sekjen APTİKOM terpilih Periode 2018-2022
 - Ketetapan Musyawarah Daerah (MusDa) APTİKOM Provinsi Riau tanggal 22 Desember 2018.
- Memperhatikan :
- Hasil Musyawarah Nasional V APTİKOM tanggal 19 Oktober 2018 di Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA UMUM APTİKOM TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN APTİKOM PROVINSI RIAU PERIODE TAHUN 2019-2023**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai pejabat yang duduk dalam kepengurusan APTİKOM Provinsi Riau Periode Tahun 2019-2023.
- Kedua : Kepengurusan APTİKOM Provinsi Riau Periode Tahun 2019-2023 bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan Kegiatan APTİKOM.
- Ketiga : Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepengurusan APTİKOM Provinsi Riau Periode Tahun 2019-2023, hasilnya wajib untuk dilaporkan kepada Pengurus Pusat APTİKOM dalam bentuk laporan akhir tahun.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta, 7 Februari 2019


Prof. Dr. Zainal A. Hasibuan, M.S., Ph.D.
KETUA UMUM

**APTİKOM**
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER


Prof. Dr. Achmad Benny Mutiara O. N.
SEKRETARIS JENDERAL

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Umum APTİKOM Pusat
Nomor : **KEP. 006/DE-SK/APTIKOM/II/2019**

**SURAT KEPENGURUSAN APTİKOM PROVINSI RIAU
PERIODE TAHUN 2019-2023**

Penasehat :

1. Gubernur Provinsi Riau
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
4. Walikota Kota Pekanbaru
5. Walikota Kota Dumai
6. Bupati Kabupaten Bengkalis
7. Bupati Kabupaten Kampar
8. Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
9. Bupati Kabupaten Indra Giri Hilir
10. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti
11. Bupati Kabupaten Rokan Hulu
12. Rektor Universitas Riau
13. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
14. Rektor Universitas Islam Riau
15. Rektor Universitas Lancang Kuning
16. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau
17. Rektor Universitas Abdurrah
18. Rektor Universitas Pasir Pangaraian
19. Rektor Universitas Islam Indra Giri
20. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
21. Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
22. Ketua STMIK-AMIK Riau
23. Ketua STIKOM Pelita Indonesia
24. Ketua STMIK Dumai
25. Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru
26. Ketua STMIK Dharmapala Riau
27. Ketua STMIK Indragiri
28. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
29. Direktur Politeknik Caltex Riau
30. Direktur Politeknik Bengkalis
31. Direktur Politeknik Kampar
32. Direktur AMIK Mitra Gama Duri
33. Direktur AMIK Dumai
34. Direktur AMIK Tridharma
35. Direktur AMIK Mahaputra
36. Direktur AMIK Selat Panjang

Pembina : Ketua Umum APTİKOM Pusat

Ketua	: Dr. Muhardi, S.Kom., M.Kom.
Sekretaris	: Akmar Efendi, S.Kom., M.Kom.
Bendahara	: 1. Lusiana, S.Kom, M.Kom.
	: 2. Ause Labellapansa, S.T., M.Kom., M.Cs.

Divisi-Divisi

Divisi Komunikasi Publik	: H. Mardayulis, S.E., M.Si.
Divisi Keanggotaan	: Ir. Mardainis, M.Kom.
Divisi Manajemen Program	: Rika Melyanti, S.Kom., M.Kom.
Divisi Teknologi Informasi dan Manajemen Pengetahuan	: Susandri, S.Kom., M.Kom.

Koordinator :

Koordinator Bidang Akademik	: Dr. Okfalisa, S.Kom., M.Sc.
Bidang Ilmu Computer Science	: Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom., M.Sc.
Bidang Ilmu S/W Engineering	: Edwar Ali, S.Kom., M.Kom.
Bidang Information System	: Herianto, S.Kom., M.Kom.
Bidang Ilmu Computer Engineering & Embedded System	: Anip Febtriko, S.Kom., M.Kom.
Bidang Ilmu Intelligent System	: Idria Maita, S.Kom., M.Sc.
Bidang Ilmu Graphic and Multimedia	: Yoyon Effendi, S.Kom., M.Kom.

Bidang Ilmu Information, Assurance & Security : Harun Mukhtar, S.Kom., M.Kom.
 Bidang Ilmu Network Engineering : Diki Arisandi, S.Kom., M.Kom.
 Bidang Ilmu IT Governance : Irwandi, S.Kom., M.Kom.
 Bidang Ilmu HCI : Sugeng Purwantoro, S.T., M.T.
 Bidang Information Technology : Nurliana Nasution, S.Si., M.Kom.

Koordinator Bidang Akreditasi : Dr. Dadang Syarif Sihabudin, S.S., S.Si., M.Sc.
 Anggota : 1. Harianja, S.Pd., M.Kom.
 2. Ir. Hj. Des Suryani, M.Sc.
 3. Dafwen Torres, S.Kom., M.Kom.
 4. Aidil Fitriyansyah, S.Kom., M.Sc.
 5. Kasmawi, S.Kom., M.Kom.
 6. Muhammad Ihsan Zul, S.Pd., M.Eng.
 7. Yohana Dewi Lulu W, S.Si., M.T.
 8. M. Irsyad, S.T., M.T.

Koordinator Bidang Sertifikasi Dosen & Sertifikasi Kompetensi : Karpen, S.Kom., M.Kom.
 Anggota : 1. Eka Sabna, S.Kom., M.Pd., M.Kom.
 2. Rahmiati, S.Kom., M.Kom.
 3. Susi Erlinda, S.Kom., M.Kom.
 4. Novriyanto, S.T., M.Sc.
 5. Rometdo Muzawi, S.Kom., M.Kom.
 6. Jasri, S.Kom., M.Kom.
 7. Haris Tri Saputra, S.Kom., M.Kom.
 8. Novi Yona Sidratul Munti, S.Kom., M.Kom.

Koordinator Perencanaan Organisasi : Dr. Dahliyusmanto, S.Kom., M.Sc.
 Anggota : 1. Ir. Syahrul, M.Sc.
 2. Ir. Pauzun, M.Sc.
 3. Roni Salambue, S.Kom., M.Si.
 4. Bambang Herawan Hayadi, S.Kom., M.Kom.
 5. Kiki Yasdomi, S.Kom., M.Kom.
 6. Wirta Agustin, S.Kom., M.Kom.
 7. Ikhsan Syarkawi, S.Kom., M.Kom.
 8. Anita Febrianti, S.Kom., M.TI.

Koordinator Humas dan Website : Feri Wongso, S.Kom., M.M.
 Anggota : 1. Beno Jange, S.T., M.M.
 2. Febiyanto, S.Kom., M.Kom.
 3. Unang Rio, S.Kom., M.Kom.
 4. Anggy Trisnadoli, M.T.
 5. Abdul Syukur, S. Kom., M.Kom.
 6. Chandra Kusuma, S.Kom., M.Kom.
 7. Yuda Irawan, S.Kom., M.TI.

Koordinator Hubungan dengan Industri & Government : Dr. H. Ridarmin Makmoer, S.Kom., M.Kom.
 Anggota : 1. Joko Rianto, S.Kom., M.M., M.Kom.
 2. Taslim, S.Kom., M.Kom.
 3. Edriyansyah, S.Kom., M.Kom.
 4. Syahtriatna, S.Kom., M.Kom.
 5. Burdianto, S.Kom., M.M.
 6. Rizqi Akbar Ramadhan, S.Kom., M.Kom.
 7. Wenni Syafitri, S.Kom., M.Kom.
 8. Ahmad Zamsuri, S.Kom., M.Kom.

Koordinator Bidang Penelitian : Dr. Erlin, S.Kom., M.Kom.
 Anggota : 1. Dr. Dewi Nasien, M.Sc.
 2. Dr. Elfizar, S.Si., M.Sc.
 3. Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom.
 4. Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom.
 5. Alwis Nazir, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
 6. Torkis Nasution, S.Kom., M.Kom.
 7. Yenni Desnelita, S.Kom., M.Kom.
 8. Ramalia Noratama Putri, S.Kom., M.Kom.

Koordinator Bidang PPM

Anggota

- : Yanti Andruyanti, S.T., M.TI., Ph.D.
- : 1. Zamzami, S.Kom., M.Kom.
- 2. Syahril, S.Kom., M.Kom.
- 3. Sukri, S.T., M.Kom.
- 4. Hendri Fonda, S.Kom., M.Kom.
- 5. Budi Yanto, M.Kom.
- 6. M. Hasnil Adiya, S.T., MBA.
- 7. Wirdatul Choiriah, S.Kom., M.Kom.
- 8. Refni Wahyuni, S.Kom., MTI.

Koordinator Bidang Publikasi Ilmiah

Anggota

- : Dr. Evizal Abdul Kadir, S.T., M.Eng.
- : 1. Dr. Arbi Haza Nasution, B.IT., M.IT.
- 2. Apri Siswanto, S.Kom., M.Kom.
- 3. Elvira Asril, S.Kom., M.Kom.
- 4. Catriwati, S.E., M.M.
- 5. Yulisman, S.Kom., M.Kom.
- 6. Yudhi Arta, S.T., M.Kom.
- 7. Uci Rahmalisa, S.Kom., M.TI.

Koordinator Area

Kabupaten Kampar
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Bengkalis
Kota Dumai
Kabupaten Meranti
Kabupaten Kuansing

- : Deddy Gusman, S.Kom., M.TI.
- : Abdullah, S.Si., M.Kom., Ph.D.
- : Mansur, S.Kom., M.Kom.
- : Asparizal, S.Kom., M.Kom.
- : Zulfikri, S.Kom., M.Kom.
- : Elgamar, S.Kom., M.Kom.



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 68 TAHUN 2017**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEKANBARU SMART CITY

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan Kota Pekanbaru adalah pendekatan pembangunan Kota modern melalui Smart City ;
- b. bahwa keberadaan perguruan tinggi sebagai lembaga riset, sumber ilmu, Inovasi dan kreatifitas merupakan potensi kekuatan dalam pengendalian kualitas pelayanan melalui penerapan ITC (Information Technology Communication);
- c. bahwa untuk mempercepat implementasi Pekanbaru Smart City perlu dukungan semua pihak, baik dunia usaha, dunia akademik maupun komunitas-komunitas kreatif dan masyarakat luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan c, perlu menetapkan keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Percepatan Pekanbaru Smart City;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi .Salah Satu Penompang Utama Adalah Implementasi e- government melalui Pembentukan Smart City.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-48 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pekanbaru Smart City dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota

- KEDUA : Tim Percepatan Pekanbaru Smart City mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam menyusun Roadmap Pekanbaru Smart City.
 2. Mengevaluasi inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kualitas pelayanan dan E-gov.
 3. Merancang inovasi dan kreatifitas dalam peningkatan kualitas pelayanan dan E-gov yang berbasis ICT.
 4. Menjembatani riset dan penelitian yang ada diperguruan tinggi dengan percepatan peningkatan pelayanan dan E-gov.
 5. Melakukan promotif hasil-hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat di implementasikan dalam Pekanbaru Smart City.
 6. Memupuk dan menumbuh kembangkan inovasi kreativitas mahasiswa dalam dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan E-gov pemerintah kota Pekanbaru.
 7. Membantu dunia usaha dalam pengembangan E-commerce.
 8. Membantu pemerintah kota Pekanbaru melakukan percepatan budaya digital dalam konteks Smart City.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Pekanbaru Smart City dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2017

Plt. WALIKOTA PEKANBARU,



EDWAR SANGER

Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru
 Nomor : Tahun 2017
 Tanggal :

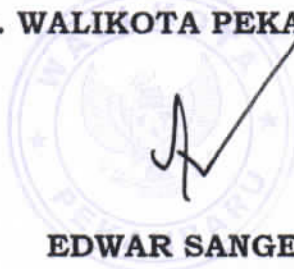
SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEKANBARU SMART CITY

No	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Pekanbaru	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah	Pembina
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Pembina
4.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kota Pekanbaru	Ketua
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Kota Pekanbaru	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Statistik & Persandian Kota Pekanbaru	Anggota
7	Kepala Seksi Infrastruktur & Teknologi Diskominfo Statistik & Persandian Kota Pekanbaru	Anggota
8	Dr. Dahliyusmanto, S.Kom, M.Sc (Universitas Riau)	Anggota
9	Benny Sukma Negara, MT (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Anggota
10	Dr. Evizal, ST, M.Eng (Universitas Islam Riau)	Anggota
11	Dafwen Toresa, S.Kom, M.Kom (Universitas Lancang Kuning)	Anggota
12	Zul Indra, ST, M.Sc (Universitas Abdurabb)	Anggota
13	Aryanto, SE, MIT, Ak (Universitas Muhammadiyah Riau)	Anggota
14	B. Herawan Hayadi, S.Kom, M.Kom (Universitas Pasir Pengaraian)	Anggota
15	Dr. R Sri Handayani, SE, MM (Universitas Islam Indragiri)	Anggota
16	Harianja S.Pd, M.Kom (Universitas Islam Kuantan Singingi)	Anggota
17	Syahlan (Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim)	Anggota
18	Hendry Fonda S.Kom, M.Kom (STMIK AMIK Hangtuah)	Anggota
19	Edwar Ali, S.Kom, M.Kom (STMIK AMIK Riau)	Anggota

No	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
20	Irwandi, M.Kom (STMIK DHARMAPALA)	Anggota
21	Sularno (STMIK Dumai)	Anggota
22	Rangga Rahmadian Yuliendi, S.Kom, M.Kom (Sekolah Ilmu Tinggi Komputer Pelita Indonesia)	Anggota
23	Mustazzihim Suhaidi, M.Kom (Sekolah Tinggi Teknologi Dumai)	Anggota
24	Muhammad Arif Fadhly Ridha, S.Kom, M.T (Politeknik Caltex Riau)	Anggota
25	Danuri, ST, MCs (Politeknik Negeri Bengkalis)	Anggota
26	Fitri, S.ST (Politeknik Kampar)	Anggota
27	Julianto Simatupang, ST, M.Kom (AMIK Mahaputra)	Anggota
28	Nurhadi, S.Kom, M.Pd (AMIK Dumai)	Anggota
29	Zulkifli, S.Kom, M.Kom (AMIK Selat Panjang)	Anggota
30	Haris Tri Saputra, M.Kom (AMIK Tri Darma)	Anggota
31	Pauzun, S.Kom, M.Sc (AMIK Mitra Gama Duri)	Anggota
32	Edryansah, S.Kom, M.Kom (Aptikom Provinsi Riau)	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2017

Plt. WALIKOTA PEKANBARU,



EDWAR SANGER



IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

ICMI CENTER, Jl. Warung Jati Timur No. 1

Kalibata - Pancoran Jakarta 12740 INDONESIA

Telp. (62-21) 7994466 Fax. (62-21) 7995111

**KEPUTUSAN
MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
Nomor : 007/SKO-P/ICMI/02/2020**

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN MAJELIS PENGURUS WILAYAH
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
RIAU PERIODE 2019-2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi kelembagaan ICMI, perlu dibentuk Organisasi Wilayah yang merupakan wadah kegiatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Propinsi/Daerah Tingkat I Riau dan sekitarnya.
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pengurus Pusat ICMI, perlu ditetapkan Komposisi Personalia Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Riau Periode 2019-2024.
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu dikeluarkan surat keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.

- Mengingat** :
- 1. Anggaran Dasar ICMI Bab VII pasal 15 dan 16, tentang Jenjang Kepengurusan dan Pimpinan Jenjang Kepengurusan;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga ICMI Bab IV pasal 15 ayat 1 tentang Majelis Pengurus Wilayah;
 - 3. Anggaran Rumah Tangga ICMI Bab VI pasal 16 tentang Majelis Pengurus Pusat;
 - 4. Anggaran Rumah Tangga ICMI Bab VI pasal 24 tentang Musyawarah Wilayah.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Musyawarah Wilayah ICMI Orwil Riau tanggal 27-29 September 2019
 2. Surat permohonan dari ICMI Owil Riau nomor : 148/ICMI/RIAU/1/2020 tertanggal 30 Januari 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan MPW ICMI Owil Riau Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia tentang pengesahan susunan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Riau periode 2019-2024 sebagaimana terlampir.

PERTAMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

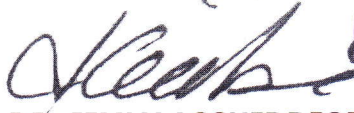
KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Riau untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
24 F e b u a r i 2020 M.
Pada tanggal : -----
30 Jumadil Tsani 1441 H.

**MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH

DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH, IPM

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
Nomor : 005/SKO-P/ICMI/02/2020**

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN MAJELIS PENGURUS WILAYAH
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
ORGANISASI WILAYAH RIAU PERIODE 2019-2024**

I. DEWAN PENASEHAT ICMI ORGANISASI WILAYAH RIAU

Ketua	: Drs. H. Syamsuar, M.Si
WakilKetua	: Dr. H. Indra GunawanEet, SP. MH
WakilKetua	: H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP
WakilKetua	: Drs. Yan Prana Jaya Indra Rasyid, M.Si
Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Ir. H. T. Dahril, M.Sc2. Prof. Dr. H. Dadang Iskandar, M.Sc3. H. Arsyadyuliandi Rahman M.BA4. Drs. H. Wan Abubakar, M.Si5. Prof. Dr. H. Amir Lutfi6. Prof. Dr. H. Muchtar Ahmad, M.Sc7. Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA8. Prof. Suwardi M.S.9. Drs. H. R. Mambang Mit10. Prof. Drs. H. Muchtar Rahman11. Prof. Drs. H. Adnan Kasyri12. Prof. Dr. Hasan Basri Jumin, M.Sc13. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA14. Prof. Dr. H. K. Suhaimi, SpOG(K)15. Hj. Azlaini Agus, MH16. Dr. drh. H. Chaidir, MM17. Al Azhar, MA18. Ir. H. Nasrun Efendi19. Dr. Mustafa Umar, MA20. Prof. Dr. H. Abdul Somad, Lc. MA21. Dr. Drs. H. Syamsurizal, MM22. Dra. Hj. Rosnaniar23. Drs. H. T. Lukman Ja'far24. Drs. H. Ahmad, M.Si25. Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.Sc26. Dr. Saidul Amin27. Drs. H. Mujtahid Thalib28. Dr. Hajar Hasan29. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.30. H. Nurzahedi, SE

Bendahara

1. Wakil Bendahara
2. Wakil Bendahara
3. Wakil Bendahara
4. Wakil Bendahara
5. Wakil Bendahara

: Ir. H. Mansyur HS, MM

- : Ir. Hj. Irma Hafidah Rachman, MBA
- : H. M. Yunus
- : Dra. Mefa Indriati, M.Pd
- : Indra, SE.M.Si
- : Ispan S. Sahputra, MM

DEPARTEMN – DEPARTEMEN

1. Departemen Theologi dan Pemikiran Islam

Ketua
Anggota

: Dr. Jamaluddin Rabaen

- : 1. Dr. Zulkarnain Umar
- 2. Dr. Zul Ikrami, LC, MA
- 3. Dr. Amrul Muzan
- 4. Dr. Iskandar Arnel
- 5. Muhammad Hanafi, LC, MA
- 6. Juprizal, S,Th.i, MH

2. Departemen Da'wahdan Pengembangan Masyarakat

Ketua
Anggota

: Dr. Ismardi Ilyas

- : 1. Zulhendri Rais, Lc, MA
- 2. Dr. H. Johari, MA
- 3. H. Sofwan Muhajir, S.Ag
- 4. Syafrudin Shaleh, M.Ag
- 5. Andree Amilis, S.Sos, MA
- 6. Anton Saputra, S.Pd.i

3. Departemen Ibadah dan Muamalah

Ketua
Anggota

: Dr. Jon Pamil

- : 1. Dr. Jarir Amrun, M.Ag
- 2. Dr. Zulfadli, Lc. MA
- 3. Dr. M. Fakhri
- 4. Drs. Basri, M.Si
- 5. Drs. Gazali Syafi'i, M.Ag
- 6. Dr. Azni Alhudri, MA

4. Departemen Sains

Ketua
Anggota

: Dr. Syamsuduha, M.Sc

- : 1. Dr. Azharuddin M. Amin, M.Sc
- 2. Dr. Hj. Musyida Umar, M.Sc
- 3. Dr. Radit Mahatma
- 4. Dr. Supriusman, MA
- 5. Dr. Alwis Nazir, M.Kom
- 6. Dr. Petir Papilo, ST. M.Sc

5. Departemen Teknologi

Ketua
Anggota

: Dr. M. Ikhsan

- : 1. Dr. Eng. Sigit Sutikno, MT
- 2. Dr. Sofia Anita, M.Si
- 3. Dr. Evizal, MT
- 4. Dr. Oktalisa, MT
- 5. Ismu Kusumanto, ST. MT
- 6. Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom

29. Departemen Teknologi Informasi dan Jaringan

Ketua
Anggota

: Dr. Feldiansyah, M.Sc

- : 1. Dr. Elfizar
2. Dr. Dahliyusmanto
3. Ikhsan, ST., M.IP
4. Jayus, M.Ikom
5. Asril Darma, S.Si
6. Surya Elhadi, ST

30. Departemen Komunikasi dan Media

Ketua
Anggota

: Dr. Aidil Haris

- : 1. Nazir Fahmi, S.Ag
2. H. Eka Putra, ST, M.Sc
3. Muhammad Amin, M.Ag
4. Sulastris
5. Tatang Yudiansyah, S.Ag
6. Budi Utamy

Ditetapkan di : Jakarta
24 Februari 2020 M.

Pada tanggal : -----
30 Jumadil Tsani 1441 H.

**MAJELIS PENGURUS PUSAT
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.


DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH, IPM.





PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 153 TAHUN 2016**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEKANBARU SMART CITY

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan Kota Pekanbaru adalah pendekatan pembangunan Kota modern melalui Smart City;
- b. bahwa keberadaan perguruan tinggi sebagai lembaga riset, sumber ilmu, Inovasi dan kreatifitas merupakan potensi kekuatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan ITC (*Information Technology Communication*);
- c. bahwa untuk mempercepat implementasi Pekanbaru Smart City perlu dukungan semua pihak, baik dunia usaha, dunia akademik maupun komunitas-komunitas kreatif dan masyarakat luas;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan Walikota Pekanbaru tentang Tim Percepatan Pekanbaru Smart City
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pekanbaru Smart City dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pekanbaru Smart City mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam menyusun Roadmap Pekanbaru Smart City.
 2. Mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan e-Gov pemerintah kota Pekanbaru.
 3. Merancang inovasi dan kreatifitas dalam peningkatan kualitas pelayanan dan e-Gov yang berbasis ICT.
 4. Menjembatani riset dan penelitian yang ada diperguruan tinggi dengan program percepatan peningkatan pelayanan dan e-Gov.
 5. Melakukan promotif hasil-hasil penelitian perguruan tinggi agar dapat diimplementasikan dalam Pekanbaru Smart City.
 6. Memupuk dan menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas mahasiswa dalam pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan e-Gov pemerintah kota Pekanbaru.
 7. Membantu dunia usaha dalam pengembangan E-commerce.
 8. Membantu pemerintah kota Pekanbaru melakukan percepatan budaya digital dalam konteks Smart City.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Pekanbaru Smart City dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal ~~20 Oktober~~ 2016

WALIKOTA PEKANBARU,



Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 153 Tahun 2016
 Tanggal : 20 Oktober 2016

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEKANBARU SMART CITY

No	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Pekanbaru	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Daerah	Pembina
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil pembina
4.	Kepala Bappeda Kota Pekanbaru	Ketua
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setda Kota Pekanbaru	Sekretaris
6.	Kasubbag PDE Sekretraiat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota
7.	Staf PDE	Anggota
8.	Dr. Dahliyusmanto, S.Kom, M.Sc (Universitas Riau)	Anggota
9.	Benny Sukma Negara, MT (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Anggota
10.	Dr. Evizal, ST, M.Eng (Universitas Islam Riau)	Anggota
11.	Dafien Teresa (Universitas Lancang Kuning)	Anggota
12.	Zul Indra, ST, M.Sc (Universitas Abdurabb)	Anggota
13.	Aryanto, SE, MIT, Ak (Universitas Muhammadiyah Riau)	Anggota
14.	B. Herawan Hayadi, S.Kom., M.Kom (Universitas Pasir Pengaraian)	Anggota
15.	Dr. R Sri Handayani, SE, MM (Universitas Islam Indragiri)	Anggota
16.	Harianja S.Pd, M.Pd (Universitas Islam Kuantan Singingi)	Anggota
17.	Syahlan (Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim)	Anggota
18.	Hendry Fonda S.Kom, M.Kom (STMIK AMIK Hangtuah)	Anggota
19.	Khusaeri Andesa, M.Kom (STMIK AMIK Riau)	Anggota

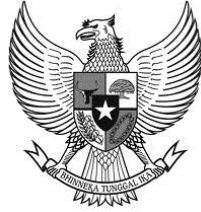
No	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
20	Irwandi, M.Kom (STMIK DHARMAPALA)	Anggota
21	Sularno (STMIK Dumai)	Anggota
22	Rangga Rahmadian Yuliendi, S.Kom, M.Kom (Sekolah Ilmu Tinggi Komputer Pelita Indonesia)	Anggota
23	Mustazihim Suhaidi, M.Kom (Sekolah Tinggi Teknologi Dumai)	Anggota
24	Yusapril Eka Putra (Politeknik Caltex Riau)	Anggota
25	Danuri, ST, MCs (Politeknik Negeri Bengkalis)	Anggota
26	Fitri, S.ST (Politeknik Kampar)	Anggota
27	Julianto Simatupang, ST, M.Kom (AMIK Mahaputra)	Anggota
28	Nurhadi, S.Kom, M.Pd (AMIK Dumai)	Anggota
29	Zulkifli, S.Kom, M.Kom (AMIK Selat Panjang)	Anggota
30	Haris Tri Saputra, M.Kom (AMIK Tri Darma)	Anggota
31	Pauzun, S.Kom, M.Sc (AMIK Mitra Gama Duri)	Anggota
32	Edryansah, S.Kom, M.Kom (Aptikom Provinsi Riau)	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS



BUPATI PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 5 Maret 2021

Nomor : 005/Bappeda-S/2021/89 Kepada :
Sifat : Penting Yth. **Dr. Evizal**
Lampiran: 1 Berkas
Perihal : **Undangan**

di –
Tempat

Bupati Pelalawan, dengan ini mengundang Saudara/i untuk dapat hadir secara virtual dan berperan aktif pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Maret 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d 12. 00 WIB
Tempat : Tempat Kerja Masing-Masing
Acara : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) RKPD Kabupaten Pelalawan
Tahun 2022.
Media : Zoom Meeting (*Meeting ID: 878 1394 0202*
Passcode: 928970)

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.


BUPATI PELALAWAN

H. M. HARRIS

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022

WAKTU	AGENDA KEGIATAN	PELAKSANA/PEMBICARA
1	2	3
RABU, 10 MARET 2021		
08.00 - 09.00	PENDAFTARAN PESERTA	PANITIA
09.00 - 09.05	MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA	PANITIA
09.05 - 09.15	PEMBACAAN DOA	KEPALA KEMENAG KABUPATEN PELALAWAN
09.15 - 09.25	LAPORAN PANITIA	KEPALA BAPPEDA KAB. PELALAWAN
09.25 - 09.40	SAMBUTAN PEMBUKAAN BUPATI PELALAWAN	BUPATI PELALAWAN - H. M. HARRIS
09.40 - 10.40	PAPARAN NARASUMBER <ul style="list-style-type: none">ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAUTELAAH POKOK PIKIRAN DPRD TERHADAP RKPD TAHUN 2022ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 DAN GAMBARAN AWAL RPJMD KAB. PELALAWAN 2021-2026	GUBERNUR RIAU KETUA DPRD KAB. PELALAWAN BUPATI PELALAWAN TERPILIH 2021-2026
10.40 - 11.40	SESI DISKUSI PANEL	BUPATI PELALAWAN - H. M. HARRIS
11.40 -11.55	PENANDATANAGAN BERITA ACARA DAN PEMBERIAN ANUGRAH DAN PENGHARGAAN <ul style="list-style-type: none">PENANDATANGANAN BERITA ACARACAMAT PENGGERAK PEMBANGUNAN TERBAIK TAHUN 2020PERUSAHAAN PELAKSKANA CSR TERBAIK TAHUN 2020	PANITIA
11.55 - 12.00	PENUTUP	BUPATI PELALAWAN - H. M. HARRIS



BUPATI PELALAWAN

Pangkalan Kerinci, 04 Mei 2021

Nomor : 005/Bappeda-S/2021/210 Kepada :
Sifat : Penting Yth. **Dr. Evizal**
Lampiran: 1 Lembar di –
Perihal : **Undangan** **Tempat**

Bupati Pelalawan, dengan ini mengundang Saudara/i untuk dapat hadir secara virtual dan berperan aktif pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Mei 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang kerja masing-masing
Acara : Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026.
Media : *Zoom Meeting*
(*Meeting ID: 856 9224 0422 Passcode: 950847*)
atau *Live Streaming* melalui kanal Youtube **Bappeda Pelalawan** dan Facebook **Bappeda Kabupaten Pelalawan**.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Saudara tepat pada waktunya diucapkan terima kasih.



SUSUNAN ACARA
MUSRENBANG RANCANGAN RPJMD
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021-2026
Senin, 10 Mei 2021

waktu	Durasi	Acara Utama	Pelaksana/ Pembicara
Sesi I Pembukaan dan Pengarahan oleh Bupati Pelalawan			
08.30 – 09.00	30 Menit	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.05	5 Menit	Pembukaan oleh MC dan Menyanyikan lagu Indonesia Raya.	MC
09.05 – 09.10	5 Menit	Pembacaan Doa	Panitia
09.10 – 09.30	20 Menit	Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Rancangan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026	Kepala Bappeda
09.30 – 09.50	20 Menit	Pengarahan Bupati Pelalawan sekaligus membuka Musrenbang RPJMD	Bupati Pelalawan
Sesi II Pengarahan dari Narasumber dan Diskusi			
09.50 – 10.05	15 Menit	Pengarahan dari Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS <i>“Terobosan dan Kebijakan untuk Mendongkrak Kontribusi Sektor Perikanan Bagi Pertumbuhan Ekonomi”</i>	Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS
10.05 – 10.20	15 Menit	Pengarahan dari Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri R.I <i>“Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah”</i>	Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri R.I
10.20 – 10.35	15 Menit	Pengarahan dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Riau, <i>“Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah”</i> .	Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Riau
10.35 – 10.50	15 Menit	Pengarahan Ketua DPP APKASINDO <i>“Potensi Bagi Hasil Kelapa Sawit bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peningkatan Pendapatan Daerah”</i>	Ketua DPP APKASINDO
10.50 – 12.00	70 Menit	Diskusi, Saran dan Masukan	Moderator: Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan
12.00 – 12.10	10 Menit	Penandatanganan Berita Acara	MC
12.10 – 12.15	5 Menit	Penutupan	MC

ICOTEN 2021 IEEE MEMBER CARD EVIZAL ABDUL KADIR

Member		2021
EVIZAL ABDUL KADIR PH.D.		
Member # 93180468 Indonesia Section	 Susan K. "Kathy" Land 2021 IEEE President	
VALUED IEEE MEMBER FOR 3 YEARS VALID THROUGH 31 DECEMBER 2021		 IEEE Advancing Technology for Humanity
www.ieee.org		

 IEEE	3 Park Avenue, 17th Floor New York, NY 10016-5997 USA
For membership information visit www.ieee.org/start	
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated is a New York not-for-profit corporation. This membership card is for the named member only and is non-transferable. All members of the IEEE shall be governed by IEEE's Constitution, Bylaws, Policies and Code of Ethics.	Additional information can be obtained from the IEEE Contact Center: www.ieee.org/contactcenter +1 800 678 4333 USA & Canada +1 732 981 0060 Worldwide
 93180468	